

PEKERJAAN SOSIAL SEBAGAI PROFESI INTERNASIONAL: PELUANG DAN TANTANGAN

Yusra Kilun

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: yura@uinjkt.ac.id

Abstract

The list of experiences in social development and social welfare throughout history was initiated by King Hammurabi in Babylon. He issued the Code of Justice in 1750, which included a requirement that one helped another during difficult time (Baker, 1995). A more modern book, written by E. Richmond, entitled "Friendship Visit in the Circle of the Poor" (1899/1969). One year after publication, he received respond from a figure of education, Simon N, Patten, questioning the terminology of "social worker" whether the main role of social worker to be advocacy (social services) is individual or not. The subsequent dialogue during this century focused on whether the social worker was a full profession or semi-profession (Hugman, 1996). As a new approach, what are the challenges and opportunities for the social worker from international perspective? The title focuses on the role of the International Federation Social Worker (IFSW) and the perspective related with the program for the development of social work in the future, and the United Nations (UN) is the main initiator of international cooperation and social development program.

Keywords: *social worker; social development; globalisation*

Abstrak

Daftar pengalaman dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial sepanjang sejarah dimulai dengan King Hammurabi di Babilonia. Dia memunculkan Kode Keadilan pada tahun 1750, yang mencakup suatu persyaratan bahwa seseorang mambantu yang lain selama masa sulit (Barker, 1995). Buku yang lebih modern lagi adalah buku yang ditulis oleh E. Richmond, dengan judul "Kunjungan Persahabatan di kalangan Du'afa" (1899/1969). Setahun setelah publikasi, dia mendapatkan tanggapan dari seorang tokoh pendidikan Simon N, Patten yang menanyakan terminology "pekerja sosial" apakah peran utama pekerja sosial menjadi advokasi atau pelayanan sosial yang bersifat individu atau tidak. Dialog berikutnya selama abad ini fokus pada apakah pekerjaan sosial suatu profesi atau semi profesi (Hugman, 1996). Sebagai suatu pendekatan baru, apa saja tantangan dan peluang bagi profesi pekerja sosial dari perspektif internasional? Judul ini fokus pada peran Federasi Internasional Pekerja Sosial (International Federation Sosial Worker or IFSW) dan perspektifnya tentang program untuk pembangunan pekerjaan sosial di masa mendatang dan PBB (United Nations) sebagai penggagas utama kerjasama internasional dan program pembangunan sosial.

Kata kunci: Pekerja sosial; pembangunan sosial; globalisasi

DOI

-

PENDAHULUAN

Dunia di masa akhir millennium ini ditandai dengan momentum proses globalisasi yang berkembang dengan cepat. Suatu desa membentuk kerangka kerja di mana kebanyakan orang memperoleh pengalaman lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari kakeknya. Akhir-akhir ini referensi semakin berkembang, pertama terhadap bangsa, lalu ranah regional, dan sekarang sudah menglobal. Saat ini kita lebih bergantung satu sama lain dari sebelumnya. Globalisasi adalah konsekuensi dari peningkatan mobilitas manusia, kemajuan komunikasi, dan terlebih peningkatan perdagangan dan pergerakan modal kapital serta perkebangan teknologi.

Pada akhirnya perkembangan tersebut telah menciptakan peluang untuk tumbuh dan berkembang dan memungkinkan berbagai negara berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Hal ini juga mempromosikan pertukaran ide, nilai budaya, aspirasi (UN, 1995). Namun sampai saat ini hanya sedikit segmen dari populasi penduduk yang mendapat keuntungan dari pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut mengharapkan sejumlah orang membangun hubungan internasional, pemahaman mereka terhadap orang lain, kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Pada waktu yang sama, di sejumlah negara kebanyakan penduduk terperangkap dengan kemiskinan, pengangguran, dan disintegrasi sosial.

Ledakan pendidikan di satu sisi merupakan penekan yang begitu kuat membentuk masa depan. Sebelumnya tidak pernah ada begitu banyaknya orang-orang terdidik, masyarakat yang memasuki kampus, dan berlanjut mendidik diri mereka sendiri sepanjang kehidupannya. Terdapat sebanyak 13 negara dengan masa sekolah rata-rata 11 tahun atau lebih, (The Economist, 1995). Namun demikian sejumlah orang di seluruh dunia tertinggal hidup tanpa akses pada dunia pendidikan yang bisa memberikan skill untuk kehidupan. Pendidikan memainkan peran kunci untuk membangun negara dari kemiskinan ke kemajuan dan kesejahteraan seperti yang telah dibuktikan oleh apa yang disebut “Singa Asean” yaitu Hong Kong, Korea, Taiwan, dan Singapura. Kegagalan berinvestasi dalam dunia pendidikan generasi muda, dapat menyebabkan atau menambah biaya masyarakat atau negara. Mereka yang tertinggal dalam pendidikan membentuk proporsi yang cukup besar yaitu mereka yang menganggur, hidup dalam keluarga miskin, memperoleh pelayanan umum yang minim, dan rendah pengeluaran (Barr, 1994).

Meskipun hal itu membuat berbagai bentuk, namun pendekatan pasar pada ekonomi saat ini sangat global, yang pada umumnya adalah pendekatan penjualan. Penurunan daya beli publik sering menjadi bagian dari apa yang disebut dengan filosofi pasar bebas. Pada negara-negara tertentu, secara politik, ekonomi, dan transisi sosial, pengalaman ini sangat sulit bagi negara yang populasi penduduknya banyak. Meskipun semua target reformasi adalah untuk mencapai standar hidup yang lebih baik dan menciptakan kebebasan individu (Barr, 1994), perbaikan-perbaikan struktural direkomendasikan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan ini menyebabkan berbagai gangguan mental. Framer, (1995, p. 5) menjelaskan proses ini bagi Eropa membentuk suatu cara yang penuh energi: “Kecepatan perubahan sosial dan ekonomi di Eropa yang begitu, tiba-tiba sudah dideklarasikan dari suasana santai ke kecepatan tinggi”.

Beberapa hasil negatif dari perubahan dicontohkan di Rusia, di mana sejumlah warga miskin meningkat dari 12 persen dari jumlah populasi 1990 menjadi 37 persen pada tahun 1992. Gambaran banyak terlihat pada keluarga Rusia yang punya anak tiga orang atau lebih. Dalam kelompok ini 72 persen terdaftar sebagai keluarga miskin pada kuartal pertama tahun 1993 (Barr, 1994). Negara lain yang ditandai oleh program perubahan atau penyesuaian struktural adalah Zimbabwe, di mana biaya untuk pendidikan umum diperkenalkan sebagai suatu hasil dari tuntutan langsung International Monetary Fund (IMF) di suatu areal Harare, pusat kota, separuh dari keluarga pergi ke kantor bantuan sosial mencoba mendapatkan bagian dari sumber yang begitu terbatas untuk

membayar biaya sekolah. Di Moroko, rumah sakit umum memungut biaya untuk setiap pelayanan, pengurangan sekolah umum memaksa masyarakat untuk memasuki sekolah swasta yang biayanya cukup tinggi, di luar kemampuan kebanyakan masyarakat (UN, 1994).

PEMBAHASAN

Pertemuan PBB : Komitmen Pemimpin Dunia dan Tantangan bagi Pekerja Sosial

Keputusan PBB untuk Pembangunan Sosial yang diadakan di Kopenhagen pada bulan Maret 1995 adalah salah satu seri konferensi penting yang diorganisir oleh PBB pada tahun 1990-an. Konferensi ini pertama kali diadakan dalam sejarah, para pemimpin dunia duduk bersama fokus pada kebijakan dan program yang ditekankan pada masalah-masalah sosial global. Tiga tema pokok dari keputusan tersebut adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong terciptanya integrasi sosial.

Keputusan masalah sosial ini melahirkan suatu deklarasi dan suatu program aksi untuk membawa dunia lebih maju. Deklarasi tersebut mencakup 10 komitmen dalam satu bingkai kerjasama internasional dan penuh respek untuk mendukung kekuatan nasional (UN, 1995, pp. 12-33), yaitu: (1) menciptakan lingkungan yang asri, (2) menurunkan jumlah angka kemiskinan, (3) menciptakan lapangan pekerjaan, (4) persamaan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, (5) membuka akses pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, (6) akselerasi ekonomi, sosial, (7) pembangunan sumber daya manusia di Afrika, (8) meyakinkan bahwa program perbaikan struktural mencakup tujuan-tujuan pengembangan, (9) peningkatan dan penggunaan sumber lokal secara efektif untuk pembangunan sosial, dan (10) meningkatkan kerangka kerjasama internasional, regional, dan sub regional, untuk pembangunan sosial.

Implementasi Sejumlah Komitmen ini akan Merubah Dunia

Sejumlah tema dan komitmen penggagas sosial menawarkan kesempatan dan sekaligus tantangan pada pekerjaan sosial internasional. Para pekerja sosial di sejumlah negara yang berbeda kesehariannya menemukan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan eksklusif sosial. Pengembangan isu-isu sosial yang penting dalam agenda global hanya memungkinkan bila ada gerakan dari kesadaran aksi secara internasional, nasional, dan lokal. Dengan potensinya membantu melahirkan perubahan, pekerjaan sosial profesional diposisikan sebagai kontributor utama untuk proses implementasi (IFSW, 1995).

Mengurangi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu konsep yang mengkonotasikan suatu standar kehidupan, kurang dapat diterima. Hal ini boleh jadi merujuk pada kemiskinan absolut, di mana kebutuhan manusia yang paling pokok atau miskin relatif di mana individu-individu atau kelompok yang hidup setengah atau kurang dari pendapatan rata-rata negara. Kemiskinan pada umumnya dikategorikan dengan kekurangan *income* untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, pakaian dan makanan pokok (Hall, 1995).

Dunia secara luas, satu dari setiap lima orang (lebih dari 1.5 miliar penduduk) hidup di bawah standar atau garis kemiskinan (UNDP, 1995). Saat ini jumlah tersebut meningkat menjadi 25 juta pertahun. 20 % masyarakat dunia biaya hidup perharinya kurang dari 1 \$. Di 15 negara miskin dunia, pendapatan rata-rata pertahunnya (GDP) kurang dari 200 \$, sementara itu 15 negara kaya dunia, memiliki pendapatan perorang (GDP) 21.000 \$ pertahun. Harapan hidup di Sierra Leone adalah 41 tahun, akan tetapi di Jepang 81 tahun. Di

Kenya, lebih dari 70.000 orang dilayani oleh satu orang dokter sementara itu di Itali terdapat 210 orang dokter (the Economist 1996). Estimasi PBB menyatakan bahwa hanya 10 % dari jumlah total penduduk dunia yang berpartisipasi secara penuh dalam dunia politik, ekonomi, sosial, dan institusi budaya yang membentuk kehidupan mereka (UNDPI, 1994). Para wanita, orang tua, anak-anak, orang-orang berkekurangan secara fisik, anggota kelompok minoritas dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang paling banyak termarginalkan.

Kemiskinan telah menjadi area pokok konsen pekerjaan sosial profesional sejak dari dulu. Sudah sekian lama peran pekerjaan sosial menekankan hal ini dan telah ditransformasi dari remedial fungsi kesejahteraan pada suatu pendekatan yang lebih berorientasi pada pengembangan. Pekerja sosial saat ini fokus pada mobilisasi sumber-sumber dan kesempatan untuk membantu mereka yang tidak beruntung dengan suatu sistem untuk membantu diri mereka sendiri sebanyak mungkin. Hal ini dikonseptualisasikan sebagai pengembangan sosial seperti dijelaskan oleh Hall (1995, p. 155):

“Pengembangan sosial menekankan keduanya yaitu kebutuhan yang lebih komprehensif dan kebijakan yang terkoordinasi dan perencanaan pada basis regional dan nasional dan kebutuhan untuk membantu kelompok-kelompok yang indiginus atau selalu muncul, untuk mengorganisasi program sebagai upaya mempengaruhi politik dan struktur birokrasi agar lebih memikirkan kebutuhan pokok mereka secara utuh”.

Hall (1995) menegaskan bahwa ada beberapa strategi pekerja sosial bisa menggunakan sebagai bagian dari suatu pendekatan pengembangan untuk kesejahteraan manusia. Salah satu strategi adalah ditujukan pada penyediaan kesempatan untuk pemasukan atau pendapatan untuk masyarakat yang lemah atau miskin. Strategi ini mencakup promosi kreasi pekerjaan melalui persahabatan dengan negara tetangga atau investasi komunitas lokal, dukungan untuk akses kredit bagi investasi, dan dorongan establisasi usaha yang produktif yang berorientasi pertumbuhan, dan perburuhan yang intensif. Suatu strategi yang terkait adalah aksi politik untuk memproduksi persamaan distribusi tanah dan penggunaan dana pemerintah yang pro kebutuhan masyarakat. Aksi politik juga diarahkan pada pembatasan regulasi yang jelas yang mendukung perkembangan operasi aktifitas ekonomi lokal informal, seperti pabrik makanan atau perdagangan melalui sistem barter. Aksi seperti ini membutuhkan penggunaan media masa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kemiskinan dan efek dari kemiskinan.

Memerangi Pengangguran

Bekerja produktif dan pekerjaan adalah elemen sentral pembangunan begitu juga elemen-elemen penting tentang identitas manusia (UN, 1995). Still, pekerjaan dan pengangguran berkembang di sejumlah negara di dunia. Fakta ini terhubung dengan hambatan dasar yang dihadapi ekonomi internasional: interrelasi antara ekonomi pasar bebas dan keberlanjutan pembangunan sosial. Level kekuatan politik di dunia harus sejalan dengan interrelasi dalam suatu cara yang efektif sampai saat ini belum muncul. Setelah sistem sosialis runtuh, ekonomi pasar bebas menjadi pemenang dalam perang dingin. Namun bagaimanapun juga, masyarakat global harus menyeimbangi kebebasan ekonomi dengan politik pekerjaan secara penuh. Faktanya, SAP atau program perubahan struktural yang strategis yang dipromosikan oleh Bank Dunia dan lembaga IMF atau bantuan Dana Moneter Internasional yang diadopsi oleh sejumlah pemerintahan justru telah menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Salah satu pencapaian pokok dari kebijakan sosial adalah keputusan memperbaiki SAPs dalam hubungannya dengan konsekuensi yang bersifat sosial. Dalam revisi ini pekerjaan sosial memposisikan dirinya dengan mengajukan pertanyaan kebijakan industrialisasi dan birokrasi yang *top down* sebagai prinsip dasar generalisasi pekerjaan di negara-negara miskin. Di negara yang penduduknya cukup banyak di Asia Utara seperti (Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Srilangka) angka

pengangguran berjumlah antara 15 sampai 20 juta, dan kekurangan pekerjaan tiga kali atau empat kali lebih besar. Pengendalian pasar ekonomi baik sektor substansial tenaga buruh atau eksploitasi mereka yang seharusnya terbebas dari pekerjaan seperti pekerja anak-anak di bawah umur. Pendekatan pekerjaan sosial terhadap kebijakan sosial haruslah sensitif terhadap hal-hal di luar kapasitas sektor produksi pokok terhadap semua substansi sumber buruh; ketidakmampuan pemerintah menyediakan kepastian hukum yang akan membantu penduduk melakukan pekerjaan, pendidikan, skil, dan akses pasar; dan ketidakmampuan sistem sosial untuk mencapai semua bagian-bagian dari masyarakat. Konsideran yang sama juga relevan di bagian lain dunia. Di Negara-negara industri bahkan terdapat kecenderungan untuk bagian masyarakat yang harus dipotong secara permanen dari pasar buruh dan kemudian dimarginalkan dari masyarakat (Acharya & Ramsay, 1995).

Memberdayakan Masyarakat yang Tidak Beruntung

Tujuan integrasi sosial adalah menciptakan masyarakat untuk semua, di mana setiap individu masing-masing dengan hak dan tanggungjawab, punya peran aktif untuk terlibat (UN, 1995). Integrasi harus berbasis pada pengakuan hak asasi manusia, dan kebebasan, budaya dan perbedaan agama, kebutuhan tertentu, kelompok yang tidak beruntung, partisipasi yang demokratis, dan kepastian hukum. Apabila komitmen dasar ini tidak jelas, tidak pasti, maka integrasi sosial bisa berarti sekedar penerimaan, kemenangan struktur dan kekuasaan yaitu suatu sistem sosial yang dominan. Integrasi sosial adalah kunci keberhasilan bagi pekerjaan sosial, yang seharusnya bergerak dari penekanan pembangunan individual ke masyarakat untuk mendukung perubahan masyarakat mencapai kebutuhan individu, yang mencakup tujuan mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Saat ini kelompok terasing mempunyai banyak kasus, termasuk kelompok yang tidak diakui atau kelompok yang ditakuti dan rasis. Banyak kelompok masyarakat seperti kelompok HIV, AIDS, pengguna obat-obat terlarang, pekerja migran, dan pengungsi, mereka terdepak dari kehidupan normal. Eklusif sosial hanya bisa didekati bila partisipasi pembuatan keputusan dengan kelompok yang terdepak dari kehidupan normal dipromosikan. Peran tradisional pekerja sosial sebagai advokasi bagi sejumlah kelompok sensitif harus diterapkan dengan strategi pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan kelompok yang terasing dari kehidupan normal menjadi agen perubahan dalam kelompok mereka masing-masing. Pekerja sosial di negara-negara industri dan di belahan dunia lainnya masih perlu banyak belajar dari metode-metode advokasi yang dirumuskan oleh Paulo Freire (1970) dan diadopsi oleh pekerja sosial Amerika Latin, yang memberdayakan profesi di daerahnya untuk menekankan suatu pemberdayaan kelompok-kelompok yang terasing dari kehidupan normal.

Pemberdayaan adalah salah satu dari sekian banyak metode pekerja sosial bisa digunakan dalam perannya sebagai agen perubahan. Davies (1994) mendiskusikan sejumlah pendekatan ini dalam bukunya, *The Essential Social Worker*. Mereka menekankan suplai masyarakat yang termarginalkan dengan pengetahuan dan alat-alat untuk meyakinkan dirinya mereka dan hak sosial masyarakat. Salah satu metode adalah bekerja dengan struktur kekuasaan lokal, regional, dan nasional untuk mempromosikan, mengembangkan dan mengimplementasikan perubahan kebijakan yang dibutuhkan. Yang lain adalah mengidentifikasi, melibatkan, dan melatih para pemimpin tertentu yang berkualifikasi dari komunitas untuk bekerja di bagian identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan pelayanan dan program yang dibutuhkan. Di samping itu, dokumentasi, dan komunikasi fakta fakta penting tentang eklusi dan marginalisasi, harus ditekankan. Pengetahuan atau pengalaman pekerja sosial yang unik bagaimana sulitnya masyarakat hidup, sangat terbatas digunakan dan bahkan tidak menjadi hal penting bagi pembuat kebijakan, media, dan masyarakat umum. Membuat

pengetahuan atau pengalaman ini dapat diakses akan mendukung sejumlah kelompok dan mungkin juga akan meningkatkan respek bagi profesi dan keahliannya (IFSW, 1995).

Pertemuan PBB: Implementasi Komitmen

Pertemuan PBB untuk Pembangunan Sosial meningkatkan pentingnya isu-isu sosial pada agenda global. Untuk pertama kalinya para pemimpin dunia menyetujui langkah penyelesaian masalah kemiskinan. Mereka juga menyadari peran sentral wanita ketika mereka menyatakan bahwa pemberdayaan wanita di masyarakat adalah kunci prakondisi bagi pembangunan sosial. Konferensi dunia yang ke empat tentang wanita di Beijing tahun 1995 mengkonfirmasi pernyataan ini. Komitmen Kopenhagen untuk mempromosikan tujuan pekerjaan secara penuh juga merupakan langkah penting, di samping adanya kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Pada akhirnya, komitmen untuk mempromosikan sosial integrasi mungkin membantu sebagai credo atau bayangan penting dari konferensi :

“Kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk mempromosikan integrasi sosial dengan cara menciptakan masyarakat yang stabil, selamat, adil, yang berbasis pada promosi dan proteksi hak asasi manusia seperti tanpa diskriminasi, toleransi, respek pada perbedaan, kesempatan kerja yang sama, solidaritas, keamanan, dan partisipasi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak beruntung, berbagai kelompok dan orang” (UN, 1995, p. 18).

Pekerjaan untuk pelaksanaan komitmen ini adalah suatu keharusan bagi masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi secara khusus pekerjaan ini merupakan tantangan bagi pekerjaan sosial. Robert Remo Bissio (1995, p. 4) menjelaskan reaksinya selama proses persiapan pertemuan sosial:

“Seorang dukun berjalan dari kota ke kota dan membawa tunas pohon. Kamu menjual apa, penduduk kota bertanya. ‘Apapun yang kamu inginkan’ jawabnya. Kami menginginkan kedamaian, keadilan, kesehatan, dan baju hangat. Mereka berkata: Maaf , jawab sang pedagang. Saya tidak menjual buah-buahan, hanya tunas. Pekerjaan sosial internasional adalah aktor kunci dalam menumbuhkan benih untuk bisa berbuah. Tantangannya adalah terlibat aktif dalam melaksanakan komitmen ini”.

IFSW: Keyakinan, Tujuan dan Program

Apa yang dimaksud dengan pekerja sosial internasional? Robert L, Barker (1995, p. 194) mendefinisikan pekerjaan sosial internasional sebagai “suatu term yang tidak begitu tepat untuk diterapkan pada: (1) organisasi internasional yang menggunakan metoda pekerjaan sosial atau personal, (2) koperasi pekerjaan sosial antar negara, (3) suatu transformasi berbagai metoda antar negara atau pengetahuan tentang pekerjaan sosial”.

Pekerjaan sosial internasional dicontohkan dengan aktifitas-aktifitas IFSW. Akar sejarah organisasi bisa dirujuk pada tahun 1928, ketika Sekretariat Permanen Pekerja Sosial dibentuk di Prancis. Sekretariat mulai aktif sampai selesai perang dunia kedua. Setelah perang, aksi berikutnya adalah membentuk IFSW dan federasi secara resmi dibentuk pada tahun 1956. Keanggotaan berbasis pada para asosiasi pekerja sosial nasional dan saat ini asosiasi tersebut berjumlah 59 negara dengan anggota IFSW lebih dari 430.000 orang.

Konstitusi IFSW (1996, p.1-2) memperkenalkan keyakinan pekerjaan sosial dan tujuan pokok organisasi sebagai berikut :

Pekerjaan sosial memperbaharui berbagai bentuk nilai kemanusiaan, agama, dan ide-ide demokrasi, dan filosofi; dan ia mempunyai aplikasi universal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang muncul dari interaksi

sosial personal dan mengembangkan potensi manusia. Profesi pekerja sosial, didedikasikan untuk melayani dan memenuhi kesejahteraan manusia; mengembangkan dan mendisiplinkan penggunaan pengetahuan ilmiah terkait dengan mental manusia dan masyarakat; pengembangan berbagai sumber untuk individu, kelompok, kebutuhan nasional dan internasional, untuk mendorong dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan Pokoknya adalah: (a) untuk mempromosikan Pekerjaan Sosial melalui kerjasama internasional, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai professional, standar, etika, hak asasi manusia, kebenaran, training dan kondisi kerja, (b) mempromosikan ketetapan atau establisasi asosiasi nasional pekerja sosial, (c) mendukung asosiasi dalam mempromosikan partisipasi pekerja sosial dalam perencanaan sosial dan formulasi kebijakan sosial secara nasional maupun internasional dan mengakui pekerjaan sosial, dan mendukung pelatihan pekerjaan sosial termasuk nilai nilai dan standar dalam pekerjaan sosial, (d) mendorong kontak antara pekerja sosial di semua negara, (e) menyediakan kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar ide dan pengalaman melalui pertemuan, kunjungan studi, proyek riset, publikasi dan berbagai metode komunikasi, (f) menetapkan dan menjaga hubungan dengan organisasi internasional yang relevan bagi pembangunan sosial dan kesejahteraan, (g) memberikan dan mempromosikan pandangan profesi pekerjaan sosial pada organisasi nasional dan internasional dengan membawa perencanaan sosial, pembangunan sosial, aksi sosial dan program kesejahteraan, (h) memelihara, mempromosikan, melakukan amandemen bila diperlukan dokumen “ Etika Pekerjaan Sosial – Prinsip dan Standar.”

Program pokok IFSW merefleksikan prinsip concern internasional dan tantangan bagi pekerjaan sosial pada dekade akhir abad 20. Hal tersebut mencakup promosi hak asasi manusia, pembangunan kebijakan isu-isu sosial, dan kemajuan standar etika internasional bagi pekerjaan sosial.

Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial

Asosiasi Internasional tentang *School of Sosial Work* dan IFSW telah menyiapkan suatu manual tentang hak asasi manusia dan pekerjaan sosial. Manual tersebut, sudah dipublikasi oleh kantor PBB urusan Hak Asasi Manusia di Genewa dalam bentuk edisi revisi tahun 1994, berdasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan yang besar dan pemahaman tentang hak asasi manusia akan meningkatkan aksi-aksi dan intervensi bagi profesi pekerjaan sosial. Dalam suatu perkenalan pada Makalah Kebijakan Internasional (1998, p. 1) IFSW menyatakan:

“Pekerjaan sosial dari konsepsinya memiliki profesi hak asasi manusia, memiliki prinsip dasar teori nilai instrinsik dari setiap manusia dan salah satu tujuan pokoknya adalah promosi struktur sosial yang sama, yang bisa mengajukan keamanan dan pembangunan di saat mendukung keputusan sikapnya”.

Term “Hak Asasi Manusia” digunakan untuk mengkomunikasikan suatu ide tentang totalitas hak asasi manusia sebagaimana diidentifikasi oleh PBB. Ada tiga tipe pembeda tentang hak yang dimuat: (1) diberi label “hak-hak negatif” merepresentasikan hak sipil dan hak politik sebagai seting bangunan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*United Nations Center for Human Rights*, 1994). Inilah hak-hak untuk meyakinkan kebebasan dari pengurangan kemerdekaan individu, (2) mencakup apa yang disebut “hak positif” (ekonomi, sosial, dan budaya) dalam deklarasi, yang ditujukan pada keadilan sosial, bebas dari kemauan, dan berpartisipasi dalam sosial, ekonomi, dan aspek budaya kehidupan, (3) mencakup “hak hak kolektif” : “Setiap orang berhak ikut pada suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan dibangun dalam deklarasi ini dapat direalisasikan secara penuh” (UN Centre for Human Rights, p. 56).

Terdapat hubungan yang jelas antara hak-hak kolektif dengan hak-hak sosial dari komitmen dan selanjutnya terdapat hubungan yang kuat antara justifikasi integrasi sosial dan konsep hak asasi manusia. Profesi pekerjaan sosial fokus pada kebutuhan manusia, dan moralitas yang merupakan kebutuhan yang fundamental, kedua hal ini bertemu bukan persoalan pilihan, akan tetapi dasar keadilan yang sangat diperlukan. Realisasi secara total dan hak politik sipil dan politik tidak memungkinkan tanpa dukungan ekonomi dan hak-hak budaya. Hak asasi manusia dapat dipisah dari teori kerja sosial, nilai, etika, dan praktek. Oleh karenanya, sulit membentuk atau menciptakan pekerjaan sosial di suatu masyarakat yang prinsip dasar hak asasi manusia tidak berjalan. Pemahaman interdependensi antara hak asasi manusia dengan praktek pekerjaan sosial yang telah dicanangkan oleh IFSW harus fokus pada area ini. Disamping itu, manual operasi hak asasi manusia menjadi concern dalam praktek pekerjaan sosial, IFSW telah mengembangkan suatu makalah kebijakan internasional tentang hak asasi manusia yang memproklamirkan standar umum dan petunjuk di wilayah hak asasi manusia untuk pekerjaan seluruh pekerja sosial profesional (IFSW, 1996).

Kebijakan Internasional dan Isu-Isu Sosial

IFSW juga telah mengembangkan suatu acuan kebijakan lain pada masalah-masalah sosial yang sering terhubung dengan Instrumen PBB, yang meliputi usia, kesejahteraan anak-anak, kesehatan, HIV/AIDS, migrasi, perdamaian dan persenjataan, perlindungan informasi pribadi, pengungsi, kondisi di wilayah pinggiran, membantu diri sendiri, wanita, dan pemuda. Pernyataan kebijakan sudah dikembangkan melalui suatu proses kehati-hatian diantara para perwakilan asosiasi pekerjaan sosial di setiap negara. Pendekatan internasional pada problem sosial diformulasikan dan kebijakan internasional didefinisikan melalui suatu proses yang demokratis, di mana semua anggota asosiasi pekerjaan sosial diundang untuk membuat komitmen dan proposal. Akhirnya, Pertemuan Umum IFSW memutuskan pemilihan resmi. Dalam acara ini para pekerja sosial dari seluruh dunia dapat menyetujui platform internasional untuk isu-isu pekerjaan sosial. Dalam suatu dunia yang berbeda suatu profesi sering kali terikat pada lingkungan lokal dan internasional. Hal itu dapat ditandai bahwa para pekerja sosial dapat menyetujui isu-isu substansi. Namun, lagi-lagi bila para pekerja sosial bertemu konsensus dapat dicapai.

Etika Pekerjaan Sosial

Pada tahun 1994 IFSW mengajukan suatu dokumen baru tentang etika pekerjaan sosial. Dokumen terbagi ke dalam dua bagian: deklarasi internasional tentang prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial dan standar etika internasional untuk pekerjaan sosial. Etika tersebut memformulasikan suatu seting prinsip-prinsip dasar etika bagi pekerjaan sosial profesional yang bisa disesuaikan dengan seting sosial dan budaya di negara-negara yang berbeda. Dokumen mengidentifikasi ruang problem etika dalam praktek pekerjaan sosial dan menyediakan petunjuk untuk pilihan metoda berkaitan dengan isu-isu atau problem etika. Kesadaran etika merupakan bagian terpenting untuk praktek profesional bagi sejumlah pekerja sosial dan komitmen untuk berbuat secara etis sebagai bagian yang sangat esensial terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien. Dalam dunia yang sangat berbeda refleksi dan debat etika seharusnya dipromosikan pada basis yang berkelanjutan. Ini adalah masalah atau tantangan terbesar ke depan dalam organisasi pekerja sosial nasional maupun internasional. Komite Permanen IFSW dalam isus-isu etika, dan anggota dari lima bagian dunia, sudah ditetapkan untuk melaksanakan proses ini (IFSW, 1994).

Masa Depan Pekerjaan Sosial Internasional

Kemanakah pekerjaan sosial internasional akan melangkah? Tugas di masa mendatang cukup banyak, akan tetapi kesempatan dan tantangan seperti berimbang. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan PBB,

“Belum pernah sebelumnya keberanian dan komitmen masyarakat terlibat dalam dunia yang begitu komparatif. Belum pernah ada sebelumnya bangsa-bangsa diorganisir dengan baik bahwa kekuatan mereka begitu dekat satu sama lain” (Boutros – Ghali, 1995, p. 362).

Deklarasi dan program aksi dari pertemuan penting tentang masalah sosial bisa jadi merupakan dokumen terpenting dalam dekade ini. Delegasi dari 186 negara dan pertemuan terbesar pemimpin dunia sudah berkomitmen pada pertumbuhan dan pembangunan sosial. Organisasi non- pemerintah (LSM atau NGO) juga berkomitmen untuk melaksanakan program aksi seperti yang disebut dalam PBB. Untuk merespon akar isu-isu pertemuan sosial, memerangi kemiskinan, mendukung keberlanjutan pekerjaan, dan mendukung integrasi sosial, pekerjaan sosial internasional telah menempatkan dirinya sebagai *mainstream* bagi pembangunan sosial.

Mengingat pentingnya isu-isu sosial internasional sudah meningkat, dan terdapat realita pertumbuhan di mana tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial secara mandiri atau uniteral. Pengalaman dari berkembangnya AIDS, obat-obat terlarang, trafiking, pemabuk kronis, kerusakan nuklir Chernobyl, dan migrasi yang berlebihan adalah realita interdependen global (Healy, 1995, p. 1509). Kesadaran ini akan menghasilkan tuntutan pengetahuan internasional di ranah pembangunan sosial dan tuntutan bagi pekerja sosial yang memiliki skill dalam pembangunan sosial. Kerjasama pekerjaan sosial internasional dibutuhkan, melalui kedua-duanya, IFSW dan arena lainnya, dengan demikian pekerja sosial profesional di seluruh dunia mampu merespon tantangan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, S., & Ramsay, R. F. (1995). *Unemployment in India: Need for Grassroots Intervention*, IFSW News Letter, 1, 7-10.
- Barker, R. L. (1995). *The Sosial Work Dictionary* (3rd ed.), Washington, DC: NASW Press.
- Barr, N. (ed), (1994). *Labour Market and Sosial Policy in Central and Eastern Europe: The Transition and Beyond*, New York: Oxford University Press.
- Bissio, R. R. (ed), (1995). *The World : A third World Guide 1995/96*. Montevideo, Uruguay: Instituto del Tercer Mundo.
- Boutros-Ghali, B. (1995). *Confronting New Challenges – Annual Report on The Work of The Organization*, New York: United States.
- Davies, M. (1994). *The Essential Sosial Worker* (3rd ed.), Aldershot, England: Arena.
- Freire, P. (1970). *Pedagogia de Oprimido*, Montevideo, Uruguay: Editorial Tierra Nueva.
- Hall, N. (1995). *Social Work and The Eradication of Poverty*, IFSW Newsletter, 1, 3-6.
- Healy, L. M. (1995). *International Social Welfare: Organization and Activities*, In R. L. Edwards, (ed. In Chief) *Encyclopedia of Social Work* (19th ed. Vol.2, pp. 1499 – 1510), Washington, DC: NASW Press.
- Hugman, R. (1996). *Professionalization in Sosial Work: The Challenge of Diversity: International Social Work*, 39, 331 – 147.
- International Federation of Social Workers, (1988). *International Policy Papers*, Geneva: Author.
- International Federation of Social Workers, (1994). *The ethicts of sosial work*, Oslo: Author.
- International Federation of Social Workers, (1995). *IFSW Newsletter* (Special edition for the Unitate Nations World Summit for Social Development).

- International Federation of Social Workers, (1996a). *Constitution*, Oslo: Author.
- International Federation of Sosial Workers, (1996b). *Policy Paper on Human Rights*, Oslo: Author.
- Kramer, D. (1995). *The Initial and Further Training of Social Workers Taking into Account their Changing Role*, Strasbourg, France: Council Europe.
- Richmond, M. E. (1996). *Friendly Visiting among The Poor*, Montclair, NJ: Patterson Smith. (Original work published 1989).
- The Economist Pocket World in Figures - 1996 edition*, (1995). London : The Economst Newspaper.
- United Nations(1994). *World Social Situationin the 1990s*, New York: Author.
- United Nations(1995). *World Summit for Social Development*, New York: Author.
- United Nations Center for Human Rights, (1994). *Human Rights and Social Work*, Geneva: Author.
- United Nations Department of Public Information, (1994). *Sosial integration*, New York : Author.
- United Nations Department of Public Information, (1995). *International Year for The Eradication of Poverty*, New York: Author.
- .